

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual diharapkan dapat memberikan landasan penerapan akuntansi pemerintahan yang lebih baik. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah di Indonesia.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Faradillah, 2013)

SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan

berbasis kas, serta mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas dana berbasis akrual. (Ardiansyah, 2013)

SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerjasama dari berbagai pihak.

Salah satu faktor yang memengaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Simanjuntak (2010) salah satu tantangan yang memengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumberdaya manusia di bidang akuntansi pemerintah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan.

Faktor yang kedua adalah komitmen organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Menurut Simanjuntak (2010) menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementerian/lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja

khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantu.

Faktor yang ketiga adalah sistem informasi, sebagai layaknya suatu peraturan baru yang mengatur suatu sistem yang berbeda cukup jauh dari sistem sebelumnya, adapun yang sudah terbiasa dengan sistem sebelumnya dan enggan berganti mengikuti peraturan yang baru. Maka dari itu perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat berjalan dengan baik. Menurut Aldiani (2010) ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya komputer dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi.

Faktor yang keempat yaitu Infrastruktur, Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000)

Penelitian ini mengacu pada empat penelitian terdahulu, yaitu penelitian Ardiansyah (2013), Ririz (2013), Andi (2013), Gabriella (2014), Abdul (2015)

Yang seluruh penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Dengan adanya perubahan standar akuntansi pemerintah dari basis kas menuju akrual maka seluruh aspek yang berkaitan dengan akuntansi dalam pemerintahan harus menyesuaikan standar yang terbaru, aspek-aspek yang berpengaruh adalah sumber daya manusia, komitmen organisasi, Sistem Informasi, dan infrastruktur.

Dari 514 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia baru Kota Semarang yang sudah menerapkan standar baru berbasis akrual. Kabupaten dan kota lainnya baru memasuki tahap persiapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual ?
3. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual ?
4. Apakah infrastruktur berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Magelang
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Magelang
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sistem informasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Magelang.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh infrastruktur terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Magelang mengenai kesiapan penerapan PP no 71 tahun 2010 agar dapat menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual secara maksimal.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan standar akuntansi pemerintah, khususnya mengenai basis akrual. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun bahan kajian dalam penelitian sejenis tentang kesiapan penerapan PP no 71 tahun 2010 pada kegiatan – kegiatan pemerintah mendatang.